

**LAPORAN KINERJA  
AKUNTABILITAS  
DIREKTORAT PENGOLAHAN  
DAN BINA MUTU  
TRIWULAN III**

*DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU  
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN*

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan



kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui nomor fax 021-35100187 atau email: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2023  
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*Performance Results*) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP selama Triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Kegiatan Ditjen PDSPKP Tahun 2020 – 2024, sebagai salah satu bagian dari pengukuran terhadap kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam mencapai tujuan utama yakni meningkatkan Volume Produk Olahan dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan.

Tujuan strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 11 Sasaran Kinerja dan 25 Indikator Kegiatan (IK). Indikator kegiatan yang dapat dilakukan pengukuran pada Triwulan III ada enam. Keseluruhan indikator kegiatan tersebut telah mencapai target bahkan terdapat tiga indikator kegiatan capaiannya melebihi dari target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Periode Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan capaian tersebut adalah 110,46% atau predikat istimewa.

Alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu adalah Rp57.470.745.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp35.739.605.794,00 atau sebesar 62,19% dari alokasi anggaran. Namun pada periode terjadi *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp9.978.705.000,00 menjadi



Rp47.492.040.000,00. Sehingga realisasi anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2023 dari alokasi anggaran setelah adanya AA

Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing IKU diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Data Umum Organisasi .....	2
1.4. Permasalahan Umum.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1. Rencana Strategis.....	6
2.2. Sasaran Kegiatan.....	6
2.3. Kebijakan.....	7
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	16
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan.....	16
3.2.1.1 Indikator Kinerja 1 .....	16
Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%).....	16
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNi Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	23
3.2.2.1 Indikator Kinerja 2.....	23
RSNi Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk) .....	23
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan .....	27
3.2.3.1 Indikator Kinerja 3.....	27
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) .....	27
3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	30
3.2.4.1 Indikator Kinerja 4.....	30
Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ( <i>Losses</i> ) (Data) ....	30



3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	33
3.2.5.1 Indikator Kinerja 5.....	33
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit).....	33
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	36
3.2.6.1 Indikator Kinerja 6.....	36
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) .....	36
3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatkan Nilai Tukar Hasil Pengolahan .....	37
3.2.7.1 Indikator Kinerja 7.....	37
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%).....	37
3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	42
3.2.8.1 Indikator Kinerja 8.....	42
Pabrik Es Yang Dibangun (Unit) .....	42
3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	44
3.2.9.1 Indikator Kinerja 9.....	44
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit).....	44
3.2.9.2 Indikator Kinerja 10 .....	47
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit).....	47
3.2.9.3 Indikator Kinerja 11 .....	50
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) .....	50
3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan .....	52
3.2.10.1 Indikator Kinerja 12.....	52
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM).....	52
3.2.10.2 Indikator Kinerja 13.....	56
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) .....	56
3.2.10.3 Indikator Kinerja 14.....	59
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri) .....	59
3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	66
3.2.11.1 Indikator Kinerja 15.....	66
Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) .....	66

3.2.11.2 Indikator Kinerja 16.....	69
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks).....	69
3.2.11.3 Indikator Kinerja 17.....	75
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) .....	75
3.2.11.4 Indikator Kinerja 18.....	77
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%) .....	77
3.2.11.5 Indikator Kinerja 19.....	78
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	78
3.2.11.6 Indikator Kinerja 20.....	80
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) .....	80
3.2.11.7 Indikator Kinerja 21.....	83
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) .....	83
3.2.11.8 Indikator Kinerja 22.....	85
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	85
3.2.11.9 Indikator Kinerja 23.....	90
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	90
3.2.11.10 Indikator Kinerja 24 .....	92
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	92
3.2.11.11 Indikator Kinerja 25 .....	94
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	94
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
4.1. Kesimpulan .....	96
4.2. Permasalahan .....	97
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut .....	97
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>





## DAFTAR TABEL

Table 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 .....	10
Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023.....	14
Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan.....	17
Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	24
Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) .....	28
Table 6 Target dan Realisasi Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan.....	31
Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu .....	34
Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan .....	37
Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP .....	38
Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun .....	43
Table 11 Target dan Realisasi <i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan .....	45
Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan.....	48
Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan.....	51
Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan.....	53
Table 15 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk.....	57
Table 16 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina.....	60
Table 17 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	68
Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan .....	70
Table 19 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi .....	71
Table 20 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja.....	71
Table 21 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin.....	71
Table 22 Kategori Penilaian IPASN .....	73

Table 23 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	74
Table 24 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP.....	75
Table 25 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	76
Table 26 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu .....	78
Table 27 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	79
Table 29 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar .....	84
Table 30 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	86
Table 31 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja .....	87
Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	91
Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	93
Table 34 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu..	3
Gambar 2	Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 .....	5
Gambar 3	Persiapan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ...	20
Gambar 4	Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB .....	21
Gambar 5	Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023 .....	23
Gambar 6	Pelaksanaan Gerai SKP di Bintan-Kepri (Kiri) dan di Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah (Kanan) .....	26
Gambar 7	Pelaksanaan Workshop NTPHP.....	38
Gambar 8	Kuesioner Survey, Rompi Survey dan Name Tag tim Daerah...	
Gambar 9	Tangkapan Layar Aplikasi NTPHP pada Server KKP.....	
Gambar 10	Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk.....	54
Gambar 11	Bimbingan Teknis Higiene Pangan Codex Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat .....	58
Gambar 12	Bimbingan Teknis CXC 1 – 1969 Codex General Principle of Food Hygiene Including Waste Management di Bali .....	58
Gambar 13	Koordinasi pemanfaatan bantuan pemerintah berupa ICS.	58
Gambar 14	Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP.....	76

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka mendukung Rencana Strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020 - 2024, adalah meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah sebanyak 7,2 juta ton pada tahun 2022 menjadi 7,3 juta ton pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap organisasi dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas.



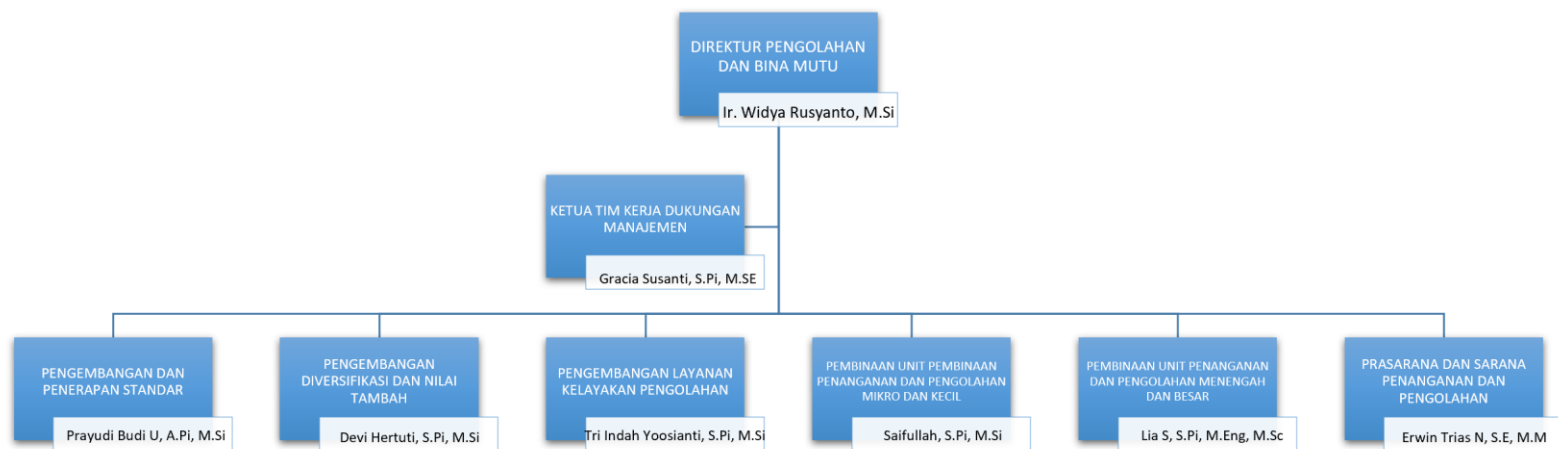
## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik,
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.3. Data Umum Organisasi**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Surat Tugas Nomor B.717/DJPDSPKP.3/KP.440/VII/2023 mengenai Penugasan Pegawai sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja menjadi dasar dari pembentukan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur dan terdapat tujuh Tim Kerja. Struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2022 berjumlah 69 orang dengan komposisi 53 orang PNS, 10 orang PPPK, dan 6 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 39 orang dan Wanita sebanyak 35 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 30 orang, S1/D4 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 13 orang, Gol III sebanyak 32 orang dan Gol II sebanyak 3 orang.

#### 1.4. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang menjadi isu aktual sehingga perlu adanya implementasi program kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, antara lain :

1. Kelayakan sarana dan prasarana pengolahan produk kelautan dan perikanan belum layak dan memenuhi standar;



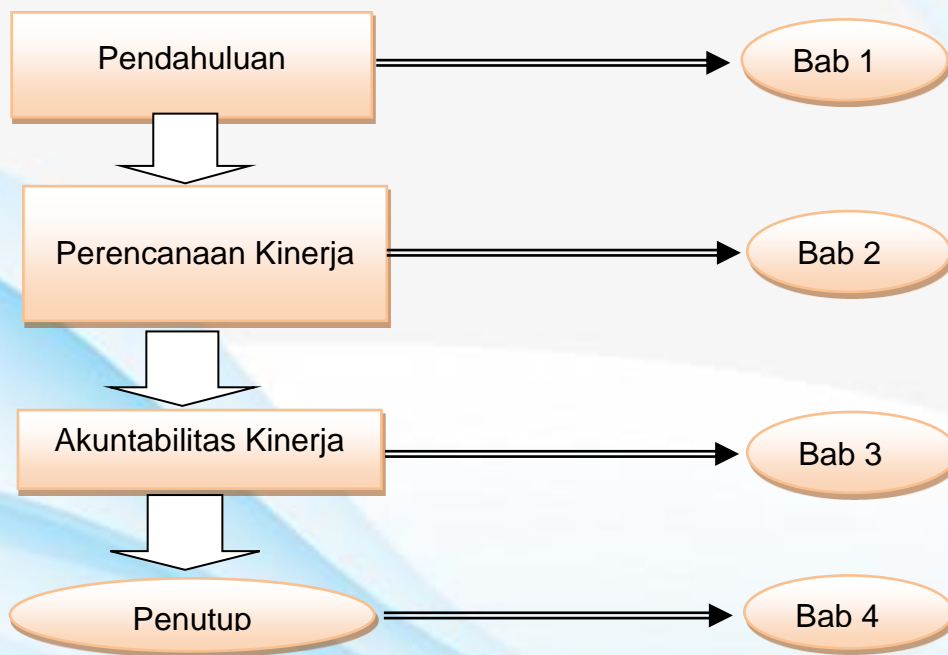
2. Komitmen penerapan jaminan mutu yang masih rendah dikalangan unit pengolah ikan;
3. Pemahaman yang masih kurang mengenai standardisasi pengolahan produk kelautan dan perikanan seperti GMP dan SSOP;
4. Kurangnya ide dan kreativitas pengolah produk kelautan dan perikanan mengenai keragaman dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan;
5. Kurangnya keberagaman produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan membuat kurangnya nilai tambah dan daya saing.

### **1.5. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan III Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan III Tahun 2023. Capaian Kinerja (Performance Results) Triwulan III Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Triwulan III Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan III Tahun 2023 diilustrasikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023





## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis**

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

### **2.2. Sasaran Kegiatan**

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 11 sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis 1. Utilitas UPI yang meningkat
- b. Sasaran Strategis 2. Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan

- c. Sasaran Strategis 3. Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan
- d. Sasaran Strategis 4. Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- e. Sasaran Strategis 5. Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- f. Sasaran Strategis 6. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- g. Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan
- h. Sasaran Strategis 8 Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- i. Sasaran Strategis 9. Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan
- j. Sasaran Strategis 10. Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
- k. Sasaran Strategis 11. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

### **2.3. Kebijakan**

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dukungan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar penetapan kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024



yang diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Sebagai upaya mendukung kebijakan tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan kebijakan yang sejalan, meliputi:

1. Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)
2. RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)
3. Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)
4. Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas) (Data)
5. Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)
6. Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)
7. Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)
8. Pabrik es yang dibangun (Unit)
9. *Chest freezer* yang disediakan (Unit)
10. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)
11. Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)
12. Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)
13. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)
14. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)
15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

16. Indeks profesionalitas ASN dilingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)
17. Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
18. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
19. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)
21. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)
22. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
25. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

#### **2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023**

Penetapan kinerja berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat



kegiatan (*input, output, dan outcome*). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Penetapan kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Table 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan ( <i>losses</i> dan utilitas) (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		<b>13.</b> Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		<b>14.</b> UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070
<b>10.</b>	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	<b>15.</b> Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		<b>16.</b> Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,5
		<b>17.</b> Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
		<b>18.</b> Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5
		<b>19.</b> Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
		<b>20.</b> Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		<b>21.</b> Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
		<b>22.</b> Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		<b>23.</b> Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		<b>24.</b> Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di	77,5



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	
		<b>25.</b> Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah memiliki 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari enam indikator yang pengukurannya bersifat triwulanan, satu indikator yang bersifat semesteran, dan 18 indikator yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja periode Triwulan III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2023. Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjaku periode Triwulan III Tahun 2023 adalah 110,46% dengan predikat istimewa. Dibandingkan dengan capaian pada periode Triwulan III Tahun 2022 yang sebesar 107,01%, terjadi peningkatan capaian sebesar 3,45%.



Gambar 3 Layar Tangkap Dashboard Nilai Capaian TW III Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Aplikasi Kinerjaku





Target Indikator Kinerja dengan Capaian realisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu periode Triwulan III Tahun 2023, disajikan dalam tabel ikhtisar berikut :

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023

No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 3		TAHUN 2023	TW 3
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	-	-		
2	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	-	-		
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)	5000	1590	1771	35,42%	111,38%
4	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses) (Data)	2	-	-		
5	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2	-	-		
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27560	-	-		
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	-	-		
8	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3	-	-		
9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	300	-	-		
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315	-	-		
11	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25	-	-		

No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 3		TAHUN 2023	TW 3
12	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800	680	680	25,42%	100%
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875	250	250	28,57%	100%
14	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070	430	430	40,19%	100%
15	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-		
16	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,5	-	-		
17	Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	-	-		
18	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5	-	-		
19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75	75	100	133,33%	133,33%
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	-		



No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 3		TAHUN 2023	TW 3
21	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92	92	133,33	144,92%	144,92%
22	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95	-	-		
23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-		
24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-		
25	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-		

## 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### 3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan

#### 3.2.1.1 Indikator Kinerja 1

##### **Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)**

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim

produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemangangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI)	68	-	-	-	-	-

Tahun 2023 persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) ditargetkan sebesar 68%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum dapat diketahui pada Triwulan III. Capaian akan dapat diketahui pada pengukuran periode Triwulan IV Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan sebesar Rp420.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp241.451.100,00 atau sebesar 57,49% dari alokasi anggaran.

Direktorat Pengolah dan Bina Mutu telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :



- a. Telah dilaksanakan Pembahasan Utilitas dan Volume Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Semester 1 Tahun 2023 pada tanggal 5-7 Juli 2023. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan volume produk olahan semester 1 (data ekspor) dan volume produk olahan semester 1 (data domestik keluar) berdasarkan data lalu lintas volume ekspor dan domestik keluar (antar pulau) pada bulan Januari s.d Juni 2023 yang diperoleh dari BKIPM.
- b. Telah dilaksanakan pembahasan profiling industri pengolahan ikan skala menengah dan besar pada tanggal 26 Juli 2023. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan kebutuhan dan *tools* integrasi database UPI skala menengah dan besar secara nasional serta mengharapkan dukungan dari tim data dan layanan publik Seditjen PDSPKP dalam pengembangan *tools* tersebut.
- c. Telah dilaksanakan Pembahasan dan Pemetaan Volume Produk Olahan untuk PerKabupaten/Kota Tahun 2022 pada tanggal 7 Agustus 2023. Agenda kegiatan adalah pembahasan perhitungan data Volume Produk Olahan tersebut dari data yang telah tersedia di 34 Provinsi.
- d. Telah dilaksanakan pembahasan dan pemetaan Volume Produk Olahan untuk Per-Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2023. Kegiatan bertujuan untuk membahas perhitungan data Volume Produk Olahan (VPO) tahun 2022 dari data yang telah tersedia di 34 Provinsi. Kegiatan ini dilakukan *justifikasi validitas* data VPO per kabupaten/kota melalui pengecekan kesesuaian data populasi dan jumlah sampel dan pembahasan data pada 4624 *rows* untuk 10 jenis kegiatan pengolahan masing-masing kabupaten/kota yang telah tersedia di Ditjen PDSPKP. Pada pembahasan ini disepakati bahwa dalam pengambilan data realisasi VPO 2022 yaitu jumlah data valid menggunakan sumber dari satudata dan untuk

- data PDS menggunakan sisa jumlah data sesuai capaian realisasi tahun 2022. Untuk data anomali kedepannya akan di cek bersama-sama, dan tim akan mensimulasikan alternatif pengambilan data sesuai dengan kesepakatan dan nanti hasilnya akan dibahas kembali.
- e. Telah dilaksanakan Penyusunan Pedoman Penghitungan Utilitas UPI Menengah dan Besar pada tanggal 21-22 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023. Kegiatan ini menyusun komponen-komponen yang harus ada pada pedoman mulai dari judul sampai akhir. *Draft* hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi sebuah buku pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam penghitungan utilitas dan VPO UPI menengah dan besar tahun 2023. Sehubungan dengan penataan sumber daya manusia di lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan, maka dilakukan pembahasan pula perubahan susunan Tim Pendataan Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023.
  - f. Telah dilaksanakan Pembahasan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 dan 2024 pada tanggal 7 September 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas estimasi pasokan kebutuhan bahan baku UPI menengah dan besar pada tahun 2023 dan 2024. Sebagai bahan untuk perhitungan neraca komoditas KKP yang disusun oleh Direktorat Logistik. Pembahasan ini menggunakan dua pendekatan dalam penghitungan estimasi kebutuhan bahan baku industri menengah dan besar tahun 2023 dan 2024 yaitu pendekatan menggunakan angka target dan pendekatan berdasarkan angka capaian volume produk olahan (VPO) setara segar pada tahun 2022.
  - g. Telah dilaksanakan Pembahasan Pendataan Utilitas dan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku unit Pengolahan Ikan skala menengah dan



besar tahun 2024 pada tanggal 24 September 2023. Target capaian VPO MB ditargetkan 2,3 juta ton dan ini akan sangat tergantung pada kinerja para enumerator provinsi dan pelaku usaha untuk UPI MB dalam melakukan pendataan dan penginputan data. Oleh karena itu diharapkan Tim Kerja PUP2MB lebih aktif dalam mengawal enumerator dan pelaku usaha dalam melakukan pendataan secara optimal. Dari data yang sudah masuk saat ini dari 13 jenis kegiatan pengolahan, diperoleh data estimasi usulan angka Neraca Komoditas tahun 2024 baik untuk industri maupun selain industri. dan selanjutnya Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan menyiapkan Memo penyampaian bahan prognosa estimasi penyusunan Neraca Komoditas kebutuhan importasi tahun 2024 ke Direktorat Logistik.

Dokumentasi kegiatan tertera pada gambar berikut :



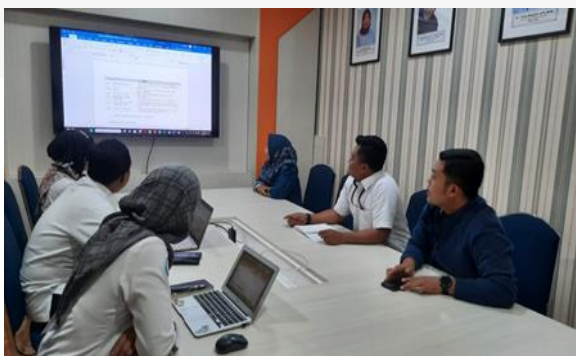
Gambar 3 Pembahasan Utilitas dan VPO Hasil Kelautan dan Perikanan UPI MB Semester 1 Tahun 2023



Gambar 4 Pembahasan Profiling Industri Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar



Gambar 5 Perhitungan data Volume Produk Olahan (VPO) tahun 2022







Gambar 6 Penyusunan Pedoman Penghitungan Utilitas UPI Menengah dan Besar



Gambar 7. Pembahasan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 dan 2024



Gambar 8. Pembahasan Pendataan Utilitas dan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024

### **3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan**

#### **3.2.2.1 Indikator Kinerja 2**

##### **RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk)**

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam *International Classification for Standards (ICS)*. Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat.

Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan.



Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	-	-	-	-	-

Tahun 2023 Triwulan III belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan RSNI Produk Hasil KP yang dirumuskan memiliki

periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi setelah RSNI tersusun pada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp299.044.200,00 atau sebesar 59,81% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan pengumpulan draft bahan RSNI dari konseptor NI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan;
2. Melakukan sirkulasi draft RSNI dari konseptor kepada komite teknis untuk mendapatkan tanggapan;
3. Melakukan Rapat Konsensus (RSNI3) Produk Perikanan untuk Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan bersama dengan Konseptor dan BSN;
4. Melakukan Rapat konsensus (RSNI3) Produk Perikanan non pangan untuk Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan non pangan bersama dengan Konseptor dan BSN;
5. Berkoordinasi dengan Komite Teknis 65-05, Komite Teknis 65-08 dan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka pelaksanaan Rapat Konsensus untuk menghasilkan RSNI3.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan diantaranya:

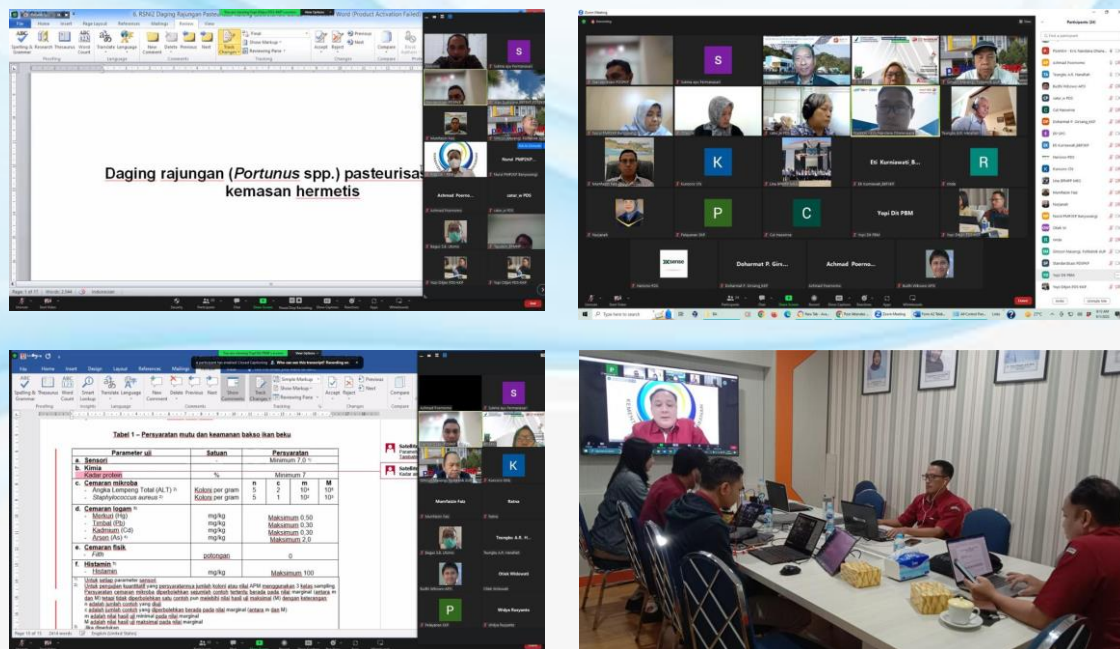
1. Kurangnya data dukung dalam perumusan RSNI 3 Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan;



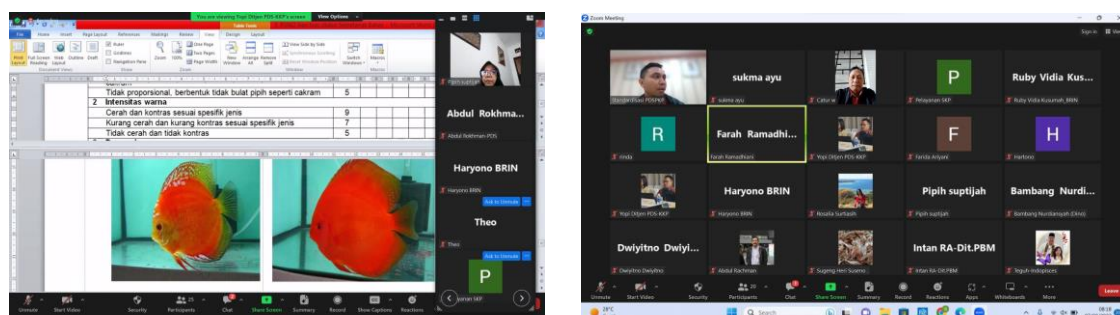
2. Terdapat beberapa acuan standar yang digunakan telah di abolisi sehingga perlu dilakukan updating;

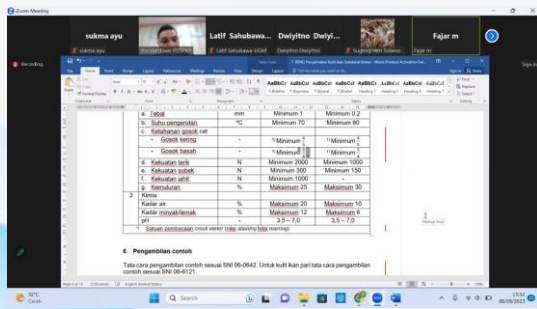
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Komite teknis dan tenaga ahli yang menguasai teknis;
2. Berkoordinasi dengan BSN terkait acuan standar yang masih berlaku untuk menggantikan standar yang telah di abolisi;
3. Melakukan jajak pendapat yang akan di koodinatori oleh tim BSN.



Gambar 9 Rapat Konsensus (RSNI3) Produk Perikanan





Gambar 10 Rapat Konsensus (RSNI3) Produk Perikanan Non Pangan

### 3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

#### 3.2.3.1 Indikator Kinerja 3

##### **Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)**

Produk olahan hasil perikanan yang mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) karena unit pengolahan ikan nya telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan telah memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (SSOP).

Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap capaian indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{produk}} = \sum S_{\text{skep}}$$



Keterangan :

Sproduk = Jumlah produk olahan perikanan yang mendapatkan Sertifikat GMP

Sskp = Jumlah Sertifikat GMP, baik perpanjangan atau baru pada tahun berjalan

Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) (Produk)	5.000	1.590	1.771	35,42	111,38	1.018

Capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 1.771 produk. Capaian ini setara dengan 111,38% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebanyak 1.590 produk. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022 (1.018 produk), maka capaian pada Triwulan III Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 753 produk atau mengalami kenaikan sebesar 73,97%. Capaian pada Triwulan III Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 35,42%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 1.422.384.600,00 atau sebesar 71,12% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan III antara lain:

1. Pelaksanaan Gerai SKP;
2. Sosialisasi SKP dengan menjadi Narasumber pada kegiatan undangan dari Daerah;
3. Sosialisasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS;
4. Pembahasan draft revisi regulasi penerbitan SKP.

Kendala pencapaian indikator kinerja Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan III diantaranya:

1. Masih terdapat UMK peserta Gerai yang belum mendapatkan rekomendasi kelayakan pengolahan;
2. Pembahasan draft regulasi revisi penerbitan SKP belum dapat dilanjutkan karena menunggu keputusan terkait probis Badan Mutu.

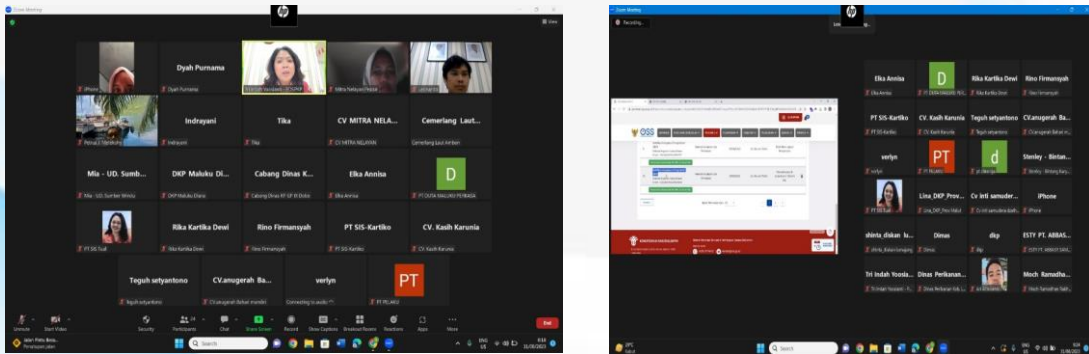
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan evaluasi gerai SKP dan koordinasi dengan Pembina Mutu Daerah terkait penerbitan rekomendasi kelayakan pengolahan bagi UMK peserta Gerai;





2. Melakukan launching implementasi Aplikasi SKP Online yang terintegrasi dengan OSS.



Gambar 11 Sosialisasi Aplikasi Integrasi OSS-SKP



Gambar 12 Pembahasan Draft Revisi Regulasi Penerbitan SKP

### 3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

#### 3.2.4.1 Indikator Kinerja 4

##### Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses*) (Data)

Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan

Bina Mutu dalam satu periode waktu. Perolehan jumlah data industry tersebut dapat dihitung dari jumlah data dan informasi Susut Hasil Produk Perikanan ditambah dengan jumlah data dan informasi Utilitas Pengolahan Hasil Perikanan.

Table 6 Target dan Realisasi Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ( <i>Losses</i> dan Utilitas) (Data)	2	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023, capaian indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan Utilitas) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap progress pelaksanaan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan Utilitas) adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan Utilitas) sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 383.401.700 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 45,64% dari pagu anggaran.



Progress kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan perhitungan susut hasil perikanan pada Triwulan III yaitu telah dilakukan finalisasi questioner menggunakan aplikasi jotform dan dilakukan simulasi pengisian oleh tim enumerator daerah untuk proses persiapan pengambilan data dilapangan, Perhitungan susut hasil di D.I.Y, Jawa Barat, Bangka Belitung, NTB.

Adapun untuk melakukan pemantauan produktivitas Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar, Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan utilitas UPI MB. Perhitungan tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan langsung ke UPI MB oleh Enumerator, serta membandingkan dengan data kapasitas terpasang dari database SKP.

Pada Triwulan III, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah Telah dilakukan Pembahasan Utilitas dan Volume Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Semester 1 Tahun 2023, Asistensi Pendataan bagi Enumerator dan Unit Pengolahan Ikan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan NTB, Asistensi pendataan dengan enumerator dan UPI di Provinsi Kepulauan Riau, Bali dan Sumatera Utara, Finalisasi pedoman penghitungan utilitas, Pembahasan Estimasi kebutuhan bahan baku tahun 2024, Pembahasan rule validasi untuk valnas data VPO tahun 2022 dan 2023.

### **3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.5.1 Indikator Kinerja 5**

##### **Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)**

UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku agar mampu menjaga mutu dan kondisi produk beku dan memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan yang berdaya saing dengan tujuan pasar terutama ekspor. Selain alat utama tersebut, operasional UPI juga harus didukung dengan peralatan penunjang pengolahan, laboratorium dan peralatan penunjang administrasi dan IPAL.

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{UPI = \Sigma UPI}$$

Keterangan :

- UPI = Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun
- $\Sigma$ UPI = Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun



Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	3	-	-	-	-	-

Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu bersifat tahunan sehingga pada periode Triwulan III belum terdapat capaian. Capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit) sebesar Rp4.350.000.000,00. Terdapat penambahan target indikator kinerja UPI Bernilai Tambah Yang Dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu yakni sebanyak satu unit, sebagai Upaya untuk mendukung program kegiatan Kampung Nelayan Maju (Kalaju). Pagu anggaran juga mengalami penambahan sebesar Rp1.719.000.000,00 sehingga pagu anggaran untuk kegiatan UPI Bernilai Tambah yang dibangun menjadi sebesar RP6.069.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp5.150.824.100,00 atau sebesar 84,87% dari pagu anggaran dengan Outstanding Kontrak (OK).

Pada Triwulan III, tahapan kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan Pemantauan secara langsung ke lokasi pembangunan pada tanggal 22 Juli 2023 dan 29 Juli 2023;

2. Melakukan Rapat pada tanggal 26 Juli 2023 secara luring di ruang rapat SKP GMB 3 lantai 13 dan secara daring melalui aplikasi zoom meeting untuk melakukan monitoring progres pelaksanaan pekerjaan, menginventarisasi kendala dan merumuskan rencana tindak lanjut;
3. Monitoring pelaksanaan harian pekerjaan Pembangunan UPI NT melalui WA Group;
4. Melakukan Pemantauan secara langsung ke lokasi pembangunan pada tanggal 10 Agustus dan 24 - 27 Agustus 2023;
5. Melakukan Pendampingan Probity Audit tanggal 29 Agustus - 2 September 2023;
6. Melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Keterlambatan Pekerjaan antara PPK dan Pelaksana tanggal 29 Agustus 2023;
7. Monitoring pelaksanaan harian pekerjaan Pembangunan UPI NT melalui WA Group;
8. Melakukan Pemantauan secara langsung ke lokasi pembangunan pada tanggal 1 September 2023 dan 28 - 30 September 2023;
9. Melakukan Show Cause Meeting 1 tanggal 5 September 2023;
10. Melakukan Show Cause Meeting 2 tanggal 19 September 2023;
11. Melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengajuan PBG tanggal 11 September 2023;
12. Monitoring pelaksanaan harian pekerjaan Pembangunan UPI NT melalui WA Group;
13. Mengirimkan Surat Permohonan Tidak Wajib Andalalin ke Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub melalui Surat Nomor B.996/DJPDSPKP.3/PDS.240/IX/2023.

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang dialami adalah :

1. Pelaksanaan Kegiatan mengalami keterlambatan dengan deviasi minus 24,173
2. Target yang ditetapkan pada SCM 2 tidak tercapai.



Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan percepatan pekerjaan pada Minggu ke-19
2. Menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis ke-2
3. Melakukan *Show Cause Meeting* 3

### **3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.6.1 Indikator Kinerja 6**

##### **Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)**

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP. Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah bantuan pemerintah yang diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{TK = \Sigma TK PBM}$$

Keterangan :

TK	=	Jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan
$\Sigma$ TK PBM	=	Jumlah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP

Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		TW III Tahun 2023	TW III	
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Produk)	27.560	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan belum memiliki capaian karena semua kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menghasilkan barang/jasa masih dalam tahap persiapan dan proses pelaksanaan sehingga belum dapat dihitung berapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan manfaat dalam kegiatan tersebut secara pasti. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan III Tahun 2022 dimana pada Triwulan III belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

### 3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan

#### 3.2.7.1 Indikator Kinerja 7

##### Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks





harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke-t dengan tahun ke-(t-1).

NTPHP > 100, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya. NTPHP = 100, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya. NTPHP < 100, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	TW III Tahun 2022
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	0,25	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Alokasi anggaran untuk Persentase Kenaikan Nilai NTPHP sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp497.958.050,00 atau sebesar 59,28% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) pada Triwulan III antara lain:

1. Pendampingan pengumpulan data Tim NTPHP Daerah ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP Penyusunan agenda kegiatan oleh Tim NTPHP;
2. Pendampingan online petugas baru Tim NTPHP Daerah;
3. Melakukan monitoring inputasi data dari Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP;
4. Validasi dan Perhitungan NTPHP Semester I Tahun 2023; serta
5. Melakukan verifikasi lapang data NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk memperoleh persentase kenaikan nilai NTPHP (%) diantaranya:

1. Pergantian petugas Tim NTPHP Daerah yang menyebabkan pengambilan data cukup terhambat;
2. Keterlambatan pengisian data pada aplikasi NTPHP oleh Tim NTPHP Daerah; serta
3. Adanya perbedaan jadwal antar Tim NTPHP Pusat terkait kegiatan verifikasi lapang ke titik sampel NTPHP

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

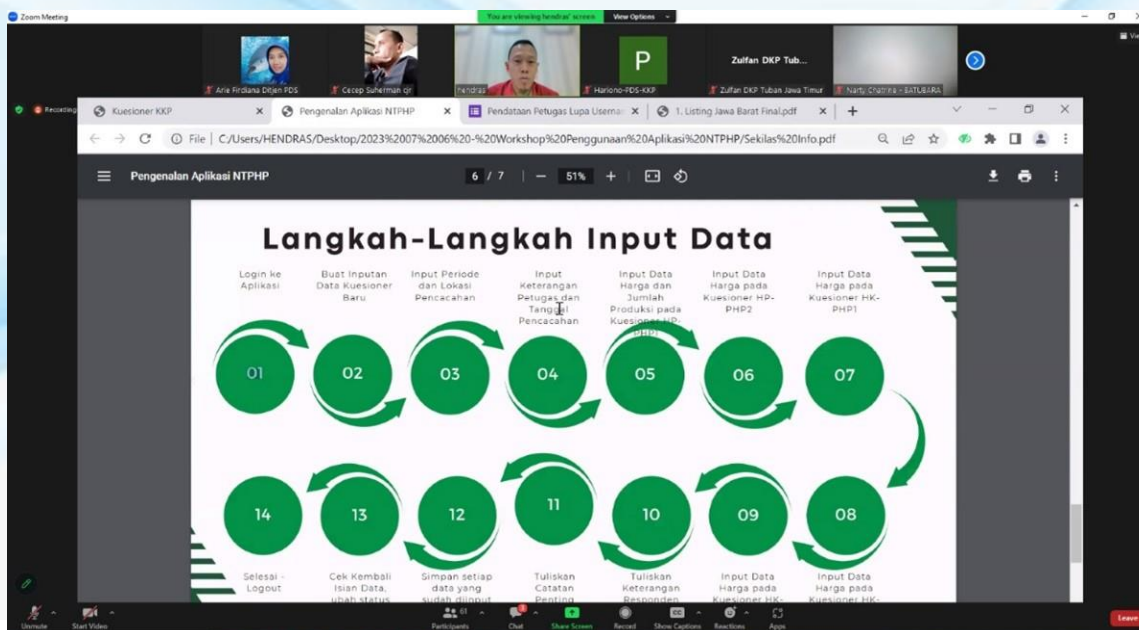
1. Melakukan mentoring petugas NTPHP Daerah yang baru;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi inputasi data oleh Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP;



3. Penjadwalan ulang kegiatan verifikasi lapang ke lokasi sampel NTPHP oleh Tim NTPHP Pusat.



Gambar 13 Pendampingan pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP



Gambar 14 Pendampingan online petugas baru Tim NTPHP Daerah

No	Pencacah	Tahun	Bulan	Provinsi	Kab / Kota	Approved	Pemeriksa	Status	Actions
1	Sony Panjaltan	2023	Februari	Sumatera Utara	Deli Serdang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
2	Anies Widyastuti	2023	Desember	Jawa Tengah	Rembang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
3	hidayatus shoimah, s.pi	2023	Juni	Jawa Tengah	Demak	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
4	Fatin Diyan Fauziyyah	2023	Desember	Jawa Tengah	Kendal	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
5	hidayatus shoimah, s.pi	2023	Desember	Jawa Tengah	Demak	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
6	Sony Panjaltan	2023	Maret	Sumatera Utara	Deli Serdang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>

Gambar 15 Monitoring inputasi data dari Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP



Gambar 16 Validasi dan Perhitungan NTPHP Semester I Tahun 2023





Gambar 17 Verifikasi lapang data NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP

### 3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

#### 3.2.8.1 Indikator Kinerja 8

##### **Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)**

Pada tahun 2023, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 3 Unit Pabrik Es yang dibangun. Pabrik Es yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan pabrik es yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$PE = \Sigma PE$$

Keterangan :

PE = Pabrik Es yang Dibangun

$\Sigma PE$  = Jumlah Pabrik Es yang Dibangun

Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)	3	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, capaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun belum memiliki capaian karena masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun sebesar Rp10.474.390.000,00 dan terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan 1 unit Pabrik Es mendukung Kampung Nelayan Maju (Kalaju) sebesar Rp1.907.250.000,00. Oleh sebab itu alokasi anggaran pada indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun menjadi Rp12.381.640.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III 2023 sebesar Rp10.627.915.950,00 atau sebesar 85,84% dari total alokasi anggaran.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja pabrik es yang dibangun meliputi :

1. Identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
2. Penyusunan analisa kelayakan dan penyusunan perencanaan teknis;
3. Monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan Pabrik Es merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak pihak terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan pihak-pihak lainnya. Sehingga kendala yang dihadapi paling banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterlambatan pengiriman material.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya diantaranya adalah melakukan monitoring berupa rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

### **3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.9.1 Indikator Kinerja 9**

##### ***Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)***

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (chest freezer) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE,

Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah *Chest Freezer* Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CF = \Sigma CF$$

Keterangan :

CF = *Chest freezer* yang Disediakan

$\Sigma CF$  = Jumlah *Chest freezer* yang Disediakan

Table 11 Target dan Realisasi *Chest Freezer* Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit)	300	-	-	-	-	305

Pada Triwulan III Tahun 2023, capaian *Chest Freezer* Yang Disediakan sudah terkirim 300 unit ke Dinas Kab/Kota. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022 dikarenakan BAST ke kelompok penerima belum dapat selesai 100%, sedangkan pada TW III pada tahun 2022 telah selesai dilakukan BAST kepada seluruh penerima bantuan pemerintah *chest freezer*.





Namun periode pelaporan indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan bersifat tahunan sehingga capaian keseluruhan akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

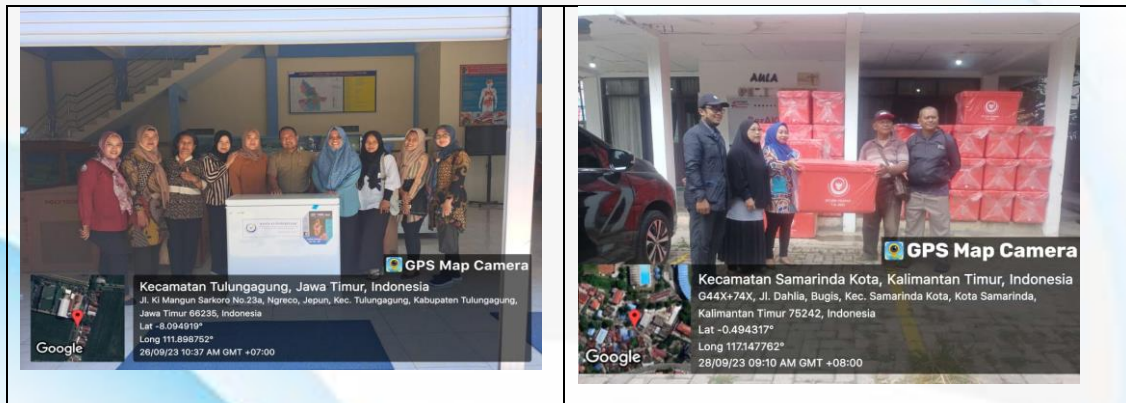
Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan sebesar Rp2.686.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran beserta outstanding kontrak (OK) sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp2.403.634.100,00 atau sebesar 89,48% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan pada Triwulan III antara lain:

1. Telah dilakukan pemesanan *Chest Freezer* dan pengiriman kepada Dinas Kab/Kota sebanyak 300 Unit;
2. Sebanyak 300 unit sudah sampai di Dinas Kab/Kota dan tahap penyerahan ke Kelompok melalui penandatanganan BAST.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota untuk monitoring *chest freezer* yang telah sampai di Dinas;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota untuk penyerahan kepada kelompok penerima dan pengumpulan BAST;
3. Melakukan monitoring pemanfaatan *chest freezer*.



Gambar 18 Penerimaan Bantuan *Chest Freezer* di Kab. Tulungagung dan Kota Samarinda

### 3.2.9.2 Indikator Kinerja 10

#### Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan value added)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun



nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$PP = \Sigma PP$$

Keterangan :

PP = Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

$\Sigma PP$  = Jumlah Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	315	-	-	-	-	200

Pada Triwulan III Tahun 2023, belum terdapat capaian Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan karena masih dalam tahapan pemesanan dan pengadaan peralatan pengolahan. Capaian pada TW III tahun 2023 jika dibandingkan dengan TW III pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada TW III tahun 2023 masih dalam tahap pemesanan dan pengadaan barang, sedangkan pada TW III ditahun 2022 telah dalam proses pengiriman dan penyerahan kepada penerima bantuan pemerintah peralatan pengolahan. Periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan

Ikan Yang Disediakan bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat secara menyeluruh pada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan sebesar Rp8.385.300.000,00 dan realisasi anggaran dengan outstanding kontrak (OK) sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp7.894.590.644,00 atau sebesar 94,15% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan pada Triwulan III antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI untuk melengkapi proposal Peralatan Pengolahan;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan peralatan pengolahan;
3. Melakukan pembelian e-katalog dengan surat surat pesanan Nomor 3623/DJPDSPKP.0/PL.420/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan yaitu usulan peralatan pengolahan sangat beragam sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses pengadaan dan ketelitian dalam proses penyalurannya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu PPK melakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia untuk mempercepat proses pengadaan dan pengiriman barang namun tidak mengabaikan unsur ketelitian sehingga kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal target yang telah ditentukan.



### 3.2.9.3 Indikator Kinerja 11

#### Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$SPP = \Sigma SPP_r + \Sigma SPPMK + \Sigma SPPRT$$

Keterangan :

SPP	=	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
$\Sigma SPP_r$	=	Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan ( <i>regular</i> )
$\Sigma SPPMK$	=	Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan
$\Sigma SPPRT$	=	Jumlah sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak

Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)	25	0	-	0	0	-

Periode pelaporan indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Sarana Pasca Panen Yang Disediakan, karena saat ini sedang dalam tahapan pemesanan dan proses pengadaan barang. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan III Tahun 2022 dimana pada Triwulan III tahun 2022 juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap pemesanan dan proses pengadaan barang.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar Rp913.500.000,00 dan terdapat penambahan anggaran menjadi sebesar Rp3.734.538.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp633.689.600,00 atau sebesar 16,97% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan pada Triwulan III adalah telah dilakukan pemesanan dengan surat pesanan :

- a. Nomor 3938/DJPDSPKP.0/PL.420/IX/2023 tanggal 25 September 2023 (SPP Reguler)
- b. Nomor 3939/DJPDSPKP.0/PL.420/IX/2023 tanggal 25 September 2023 (SPP MP Korporasi)
- c. Nomor 3940/DJPDSPKP.0/PL.420/IX/2023 tanggal 25 September 2023 (SPP Revitalisasi Tambak)



Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan yaitu Ketersediaan lahan & persyaratan lahan masih dipersiapkan oleh calon penerima.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Dinas KP terkait penyiapan lokasi Sarana Pasca Panen;
2. Percepatan proses pekerjaan pengadaan barang oleh Penyedia.

### **3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.10.1 Indikator Kinerja 12**

##### **Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)**

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{mutu}$$

**Keterangan :**

n = Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

$\sum n_{mutu}$  = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu

Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	1.800	680	680	37,78	100	570

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 680 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebanyak 680 UMKM. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022 (570 UPI), capaian pada Triwulan III





Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 110 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar 19,3%. Capaian pada Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan adalah 37,78%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebesar Rp 1.842.292.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp809.935.000,00 atau sebesar 43,96% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan Asistensi Kepada Penerima Bantuan Bedah UPI Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang Secara Online;
2. Melakukan Pembinaan Lapangan ke UPI skala mikro dan kecil di Provinsi Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Lingga,), Jawa Timur (Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Gresik), Jawa Tengah (Kab. Pati), DI Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman);
3. Melakukan Pembinaan Lapangan ke Sentra Pengolahan di Kabupaten Bantul dan Kota Bandar Lampung;
4. Berpartisipasi dalam Kegiatan Gerai SKP sebagai bagian dari pembinaan penerapan kelayakan dasar pengolahan di UPI skala mikro dan kecil;
5. Melakukan Kegiatan Sertifikasi Asisten Pengolah Ikan (S-API) bagi siswa/i SMK Puring, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
6. Melakukan monitoring pelaksanaan Bedah UPI TA 2023 di Kab. Sleman;

7. Melakukan Remote Pembinaan ke UPI Skala Mikro dan Kecil di Kab. Rembang, Kab. Lingga, Kab. Tulungagung, Kab. Banyuwangi, Kab. Palu, Kab. Gresik, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Sleman, Kab. Kebumen, Kota Tangerang Selatan, Kab. Gorontalo, Kota Bandar Lampung, Kab. Kediri dalam hal penyusunan panduan mutu dan pendaftaran SKP online;
8. Pendataan dan Pembinaan industri pemindangan;
9. Bekerjasa sama dengan DKP Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan terhadap pembina mutu;
10. Verifikasi data UPI skala mikro dan kecil dengan pembina mutu Kab/Kota/Propinsi untuk data pembinaan.



Gambar 19 Pembinaan UPI terkait Mutu (Penerapan Kelayakan Dasar Pengolahan)



Pada Triwulan III, belum terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan pencapaian target indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan.

Sedangkan, untuk rencana yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan pembinaan dalam penerapan kelayakan dasar pengolahan bagi UPI skala mikro dan kecil secara langsung maupun jarak jauh;
2. Melakukan pemantauan progress kegiatan Bedah UPI dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Tahun 2023.

### **3.2.10.2 Indikator Kinerja 13**

#### **Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)**

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{\text{ragam}}$$

**Keterangan :**

n = Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk

$\sum n_{\text{ragam}}$  = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk

Table 15 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	875	250	250	28,57	100	160

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 250 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebanyak 250 UMKM. Jika dibandingkan dengan



capaian pada Triwulan III Tahun 2022 (160 UPI), maka capaian pada Triwulan III Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 160 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar 177,78%. Capaian pada Triwulan III Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 28,57%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebesar Rp6.744.608.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp4.431.842.550,00 atau sebesar 65,71% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk pada Triwulan III antara lain:

1. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Melawi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pati, Kabupaten Tabanan, dan Kota Bontang;
2. Pembinaan UPI/UPHPN terkait Diversifikasi Produk di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sintang, Kota Bontang;
3. Teknologi Pengemasan dan Pelabelan Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan dan Kemasan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 20 Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk

Pada Triwulan III, belum terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan pencapaian target indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk.

### 3.2.10.3 Indikator Kinerja 14

#### UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang bersaing di pasar regional maupun global sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Unit Penanganan dan unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu. Pada tahun 2023, target UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebanyak 1.070 industri.



Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \sum IMB$$

**Keterangan :**

- P = Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina
- $\sum IMB$  = Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina

Table 16 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)	1.070	430	430	40,19	100	90

Capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 370 industri. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebanyak 430 industri. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022 (90 industri), capaian pada Triwulan III Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 340 industri atau mengalami kenaikan sebesar 377,78%. Capaian pada Triwulan III Tahun 2023

dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 40,19%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp643.975.400,00 atau sebesar 76,66% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan III yaitu :

1. Telah dilaksanakan Monitoring pemanfaatan Pabrik Rumput Laut pada tanggal 4 dan 14 Juli 2023. Monitoring bertujuan untuk mengetahui update informasi pemanfaatan pabrik rumput laut meliputi status operasional, pengelola, permasalahan yang dihadapi, produktifitas, hingga tindak lanjut oleh dinas dan pusat dari hasil monitoring. Dari pabrik rumput laut yang beroperasi mengalami beberapa kendala seperti kesulitan pengujian gel strength, pembiayaan, pemenuhan penggunaan air dan sumberdaya manusia;
2. Telah dilaksanakan Koordinasi Berkala Pemantauan Operasionalisasi Pabrik Tepung Ikan pada tanggal 20 Juli 2023. Monitoring bertujuan untuk mengetahui update informasi pemanfaatan pabrik tepung ikan meliputi status operasional, pengelola, permasalahan yang dihadapi, produktifitas, hingga tindak lanjut oleh dinas dan pusat dari hasil monitoring. beberapa permasalahan yang hadapi adalah keterbatasan bahan baku, kurang optimalnya mesin saat beroperasi dan keterbatasan pemeliharaan dan perawatan peralatan;
3. Telah dilaksanakan monitoring pemanfaatan Pabrik Rumput Laut di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 27 Juli 2023. Rapat

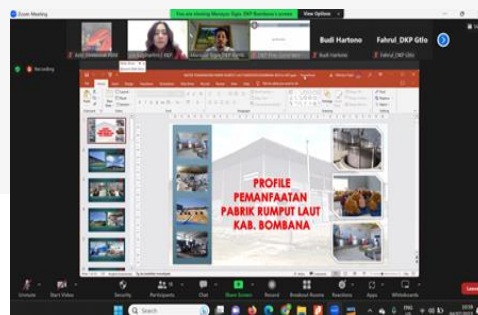


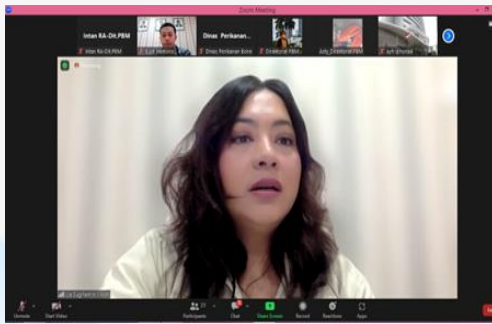


bertujuan untuk memfasilitasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta pengelola Pabrik Rumput Laut untuk memberikan laporan pemanfaatan pabrik rumput laut meliputi status operasional, pengelola, permasalahan yang dihadapi, produktifitas kepada LPUMKP untuk pengajuan dana operasional;

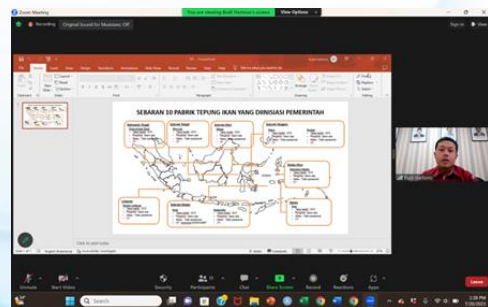
4. Telah dilaksanakan Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tanggal 2 Agustus 2023;
5. Telah dilaksanakan Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2023;
6. Telah dilaksanakan Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2023;
7. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Kepada Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 kepada 21 pelaku usaha (UPI) sesuai undangan beserta Dinas KP yang melakukan pembinaan pada tanggal 18 Agustus 2023;
8. Telah dilaksanakan monitoring progres pemanfaatan *Integrated Cold Storage* (ICS) di lokasi Sumenep dan Malang pada tanggal 18 Agustus 2023;

9. Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Penanganan dan Pengolahan skala Menengah dan Besar maka diperlukan Pedoman sebagai dasar pelaksanaan. Oleh karena itu, telah dilakukan penyusunan pedoman pembinaan mutu untuk UPI Skala Menengah Besar pada tanggal 25 Agustus 2023;
10. Telah dilaksanakan Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Agustus 2023;
11. Telah dilaksanakan Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Bali pada tanggal 15 September 2023;
12. Pembahasan konsep hilirisasi dalam meningkatkan kinerja dan utilitas Unit Pengolahan Tuna pada tanggal 25 September 2023.

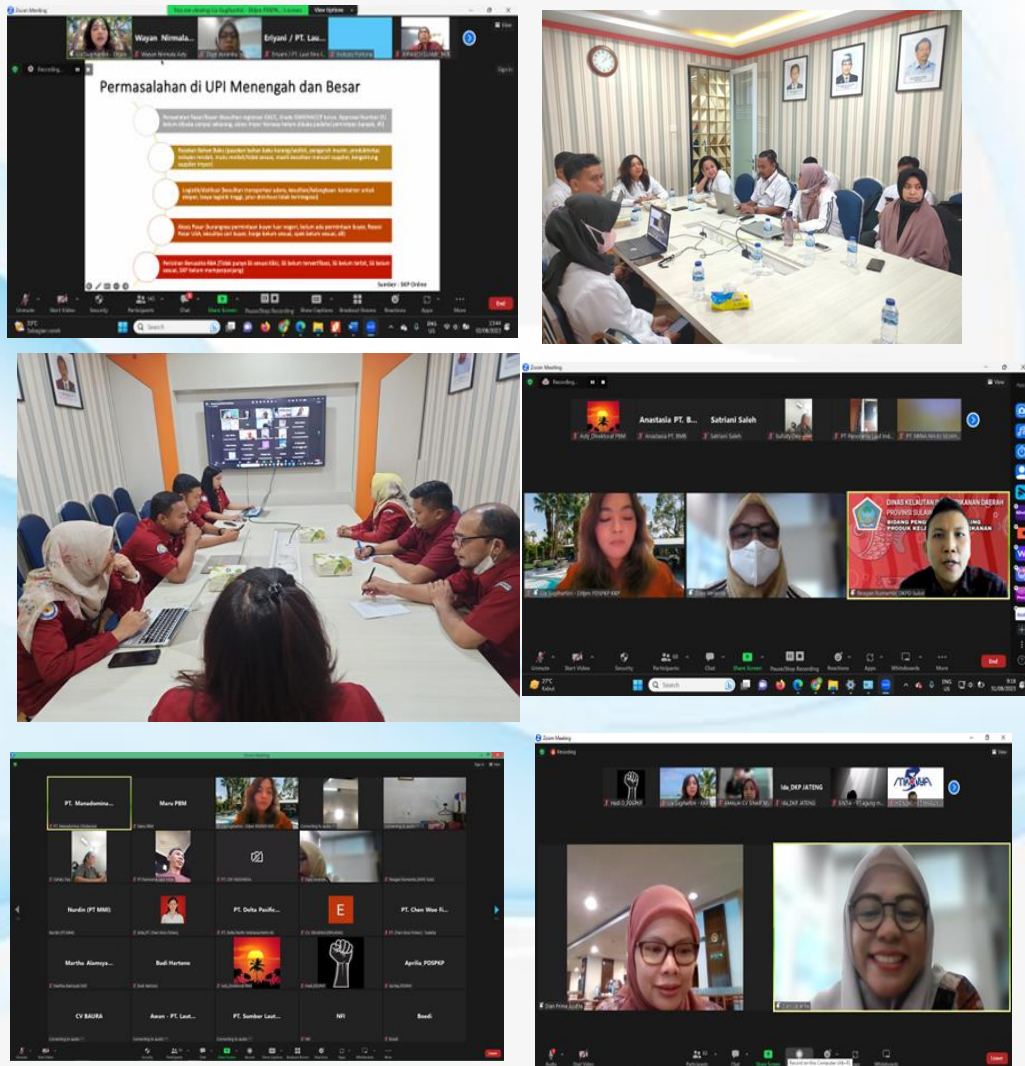




Gambar 21 Monitoring pemanfaatan Pabrik Rumput Laut



Gambar 22 Monitoring pemanfaatan Pabrik Tepung Ikan



Gambar 23 Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan Asistensi Pendataan Utilitas Dan Volume Produk Olahan

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina diantaranya:

1. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi pembaruan regulasi dan Pembinaan Persyaratan Mutu dan



Keamanan Pangan bagi UPI secara luring. Oleh karena itu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada UPI skala Menengah dan Besar dilaksanakan secara daring atau *hybrid*;

2. Belum optimalnya pemanfaatan bantuan pemerintah berupa *Integrated Cold Storage* (ICS), pabrik Rumput Laut dan Pabrik Tepung Ikan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam update pemanfaatan Bantuan Pemerintah;
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Direktorat Pemasaran, Direktorat Logistik, Direktorat Usaha dan Investasi dan LPUMKP dalam optimalisasi Bantuan Pemerintah;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kompetensi terkait jaminan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan;
4. Tetap melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap UPI MB secara daring.

### **3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu**

#### **3.2.11.1 Indikator Kinerja 15**

##### **Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)**

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;



- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Table 17 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum terdapat capaian Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu dikarenakan masih dalam tahap menunggu hasil penilaian dari TPN.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III antara lain:

1. Telah dilakukan *weekly briefing* Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu,

2. Mengikuti rapat sosialisasi terkait dengan reformasi birokrasi dan wilayah bebas korupsi.

Pada Triwulan III Tahun 2023 belum terdapat kendala pada progress capaian target indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu karena masih pada tahap menunggu konfirmasi penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya tetap melakukan input data dukung yang masih diperlukan selama waktu tunggu konfirmasi hasil penilaian oleh TPN.

### **3.2.11.2 Indikator Kinerja 16**

#### **Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :





- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Dengan formulasi sebagai berikut :

Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Table 19 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	40	40	40

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Table 20 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Table 21 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Indeks Profesionalitas ASN Dirketorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,5. Sumber data pengukuran Indeks



Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
  - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
  - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
  - **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  - **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi

hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPASN &= \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin} \\ IPLev\ 2 &= \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2} \\ IPLev\ 1 &= \text{IPASN Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2} \end{aligned}$$

Gambar 5 Rumus Matematis Perhitungan IPASN

Table 22 Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah



Table 23 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	83,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat semesteran, sehingga capaian realisasi dapat dilihat pada Triwulan IV. Belum terdapat capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III Tahun 2023.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III antara lain:

1. Mengingatkan secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai;
2. Pegawai mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan sosialisasi yang sesuai dengan bidang pengolahan dan pembinaan mutu yang dapat menambah kompetensi pegawai;
3. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai.

Belum terdapat kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah tetap melakukan pengingatan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan *update* data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

### 3.2.11.3 Indikator Kinerja 17

#### **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat PBM merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat PBM.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,5. Nilai PM SAKIP Direktorat PBM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Eselon I Ditjen PDSPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :

Table 24 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang



Table 25 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III antara lain:

1. Keikutsertaan pada kegiatan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks cascading lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 3 Juli 2023;
2. Keikutsertaan pada kegiatan Pembahasan revisi renstra dan pohon kinerja tematik pada tanggal 13 Juli 2023;
3. Keikutsertaan pada kegiatan revisi Rencana Strategis (Renstra) serta adanya rencana penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023. Kegiatan dimaksud melibatkan Biro perencanaan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian PPN/Bappenas;

4. Keikutsertaan pada kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan;
5. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP dan serta stakeholders terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
6. Keikutsertaan pada kegiatan verifikasi dan validasi PMSAKIP level II yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 24-25 Juli 2023 di Bogor.

Belum terdapat kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.

#### **3.2.11.4 Indikator Kinerja 18**

##### **Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)**

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas





sistem pengendalian intern. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada Direktorat PBM Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Direktorat PBM Tahun 2023}} \times 100$$

Table 26 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

### 3.2.11.5 Indikator Kinerja 19

#### **Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023

yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PBM}} \times 100$$

Table 27 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	75	75	100	133,33	133,33	100

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 133,33% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu 75. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022 (100), capaian pada Triwulan III Tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Capaian pada Triwulan III Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 133,33%.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja yang menangani terkait kegiatan yang terdapat temuan pengawasan dari Itjen KKP;
2. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi SIDAK;
3. Melakukan konsolidasi dengan bagian keuangan DJPDSPKP dan Itjen terkait verifikasi pemenuhan data dukung terhadap temuan hasil pengawasan.

#### **3.2.11.6 Indikator Kinerja 20**

##### **Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada

- KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat

4. Dapat Ditransfer/Direplikasi

5. Berkelanjutan

- KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum

2. Kelompok Khusus

Adapun aspek penilaiannya dibagi menjadi dua yakni :

a. Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

b. Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

Formula Pengukuran :

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I



Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Table 28 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi  TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III, sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan D. I. Yogyakarta.

### 3.2.11.7 Indikator Kinerja 21

#### **Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indicator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan dalam system informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5;
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1;
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara pengukuran indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar :

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*);
2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :



- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload;
- keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2;
- Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan;
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	92	133,33	144,92	144,92	100

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 133,33. Capaian ini setara dengan 144,92% dari target Triwulan III Tahun 2023 yaitu 92. Capaian pada Triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2022 dan pada Triwulan II Tahun 2023,

dikarenakan perbedaan cara perhitungan capaian dan aplikasi yang digunakan dalam melakukan penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

### **3.2.11.8 Indikator Kinerja 22**

#### **Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada tahun 2021 bersumber dari APBN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan pagu sebesar Rp. 57.470.745.000,00.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \Sigma a/b \times 100\%$$

Keterangan :

- a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)
- b = nilai pagu anggaran (Rp)
- x = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)





Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	95	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan secara tahunan sehingga capaian dapat dilihat pada Triwulan IV. Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu. Indikator Kinerja ini memiliki perbedaan satuan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2022, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Realisasi anggaran di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp35.739.605.794,00 atau sebesar 62,19% dari alokasi anggaran awal sebelum terjadi *Automatic Adjustment* (AA) atau sebesar 75,25% dari alokasi anggaran setelah terjadi AA yaitu Rp47.492.040.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III yaitu rutin melakukan penginputan realisasi keuangan di aplikasi SAKTI.

Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat	-	-	-
2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	500.000.000	302.754.700	60,55
3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP)	2.000.000.000	1.422.384.600	71,12
4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas)	840.000.000	383.401.700	45,64
5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah	6.069.000.000	5.150.824.100	84,87



<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
	yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu			
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan	-	-	-
7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP	840.000.000	497.958.050	59,28
8.	Pabrik es yang dibangun	12.381.640.000	10.627.915.950	85,84
9.	Chest freezer yang disediakan	2.686.200.000	2.403.634.100	89,48
10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan	8.385.300.000	7.894.590.644	94,15
11.	Sarana pasca panen yang disediakan	4.363.000.000	1.170.389.000	26,82

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
12.	Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	1.842.292.000	809.935.000	43,96
13.	Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk	6.744.608.000	4.431.842.550	65,71
14.	UPI skala menengah dan besar yang dibina	840.000.000	643.975.400	76,66



No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Jumlah	47.492.040.000	35.739.605.794	75,25

### 3.2.11.9 Indikator Kinerja 23

#### **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Aspek Market (40%)
- b. Aspek Demand (60%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari :

#### **jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand**

Penilaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III sudah sesuai dengan ketentuan proses pengadaan barang dan jasa.

Tahapan yang dilakukan yaitu tahap identifikasi kebutuhan dengan melakukan penerimaan pengajuan proposal permintaan dari penerima manfaat. Melakukan perencanaan penganggaran dengan membuat RKAKL kemudian merumuskan kebijakannya dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan, kemudian menyusun Kerangka Acuan Kerja nya setelahnya yang sedang berjalan saat ini yaitu melakukan penginputan spesifikasi kebutuhan barang dan jasa ke dalam e-katalog.



### 3.2.11.10 Indikator Kinerja 24

#### **Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun Pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun sebelumnya (T-1).

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau

kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, terus dilakukan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Dinas Kab/Kota atau masyarakat pada tahun 2022 dan termasuk dalam kegiatan prioritas.





### **3.2.11.11 Indikator Kinerja 25**

#### **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formula perhitungan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dapat diukur dari :

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi TW III Tahun 2022
	Tahun 2023	TW III		Tahun 2023	TW III	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV. Pada Triwulan III Tahun 2023, belum ada capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Triwulan III, diantaranya melakukan updating kondisi BMN secara berkala dan melakukan pencatatan transaksi BMN kedalam aplikasi SAKTI.



## **BAB IV. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan III Tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja telah berjalan dengan baik.
- b. Terdapat enam indikator kinerja yang capaian realisasinya secara triwulanan.
- c. Sebanyak tiga indikator kinerja yang capaian realisasi 100%, yaitu Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan, Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk, dan UPI skala menengah dan besar yang dibina.
- d. Sebanyak tiga indikator kinerja yang capaian realisasi lebih dari 100%, yaitu Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP), Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar, dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.

## 4.2. Permasalahan

Secara umum realisasi output kegiatan semua telah tercapai dan ada yang melebihi target, sehingga secara menyeluruh belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pencapaian realisasi target indikator kinerja.

Secara khusus permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan ketersediaan dan persyaratan lahan untuk Sarana Pasca Panen yang disediakan masih dalam proses persiapan sehingga terjadi kemunduran waktu pelaksanaan;
2. Usulan peralatan pengolahan sangat beragam sehingga memerlukan waktu yang cukup Panjang dalam proses pengadaan;
3. Terjadi keterlambatan Pembangunan UPI bernilai tambah dengan deviasi minus 24,173 serta target pada SCM 2 tidak tercapai.

## 4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Dinas KP terkait penyiapan lokasi Sarana Pasca Panen serta percepatan proses pekerjaan pengadaan barang oleh penyedia;
2. PPK melakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia untuk mempercepat proses pengadaan dan pengiriman agar dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Menerbitkan surat peringatan kontrak kritis ke-2 dan melakukan show cause meeting ke-3.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**  
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juli 2023

**Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya  
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Budi Sulistiyo**

**Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan dan  
Bina Mutu**

**Widya Rusyanto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875



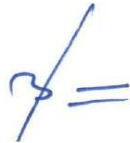
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1.070
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	15. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Nilai)	75
		16. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,2
		17. Nilai penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
		18. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5
		19. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	92
		22. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		25. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5

## DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	57.470.745
<b>Total Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023</b>		<b>57.470.745</b>

Jakarta, 24 Juli 2023

**Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya  
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



**Budi Sulistiyo**

**Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan dan  
Bina Mutu**



**Widya Rusyanto**

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Direktur Pengolahan dan Bina Mutu	
2.	Koordinator Program Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	

